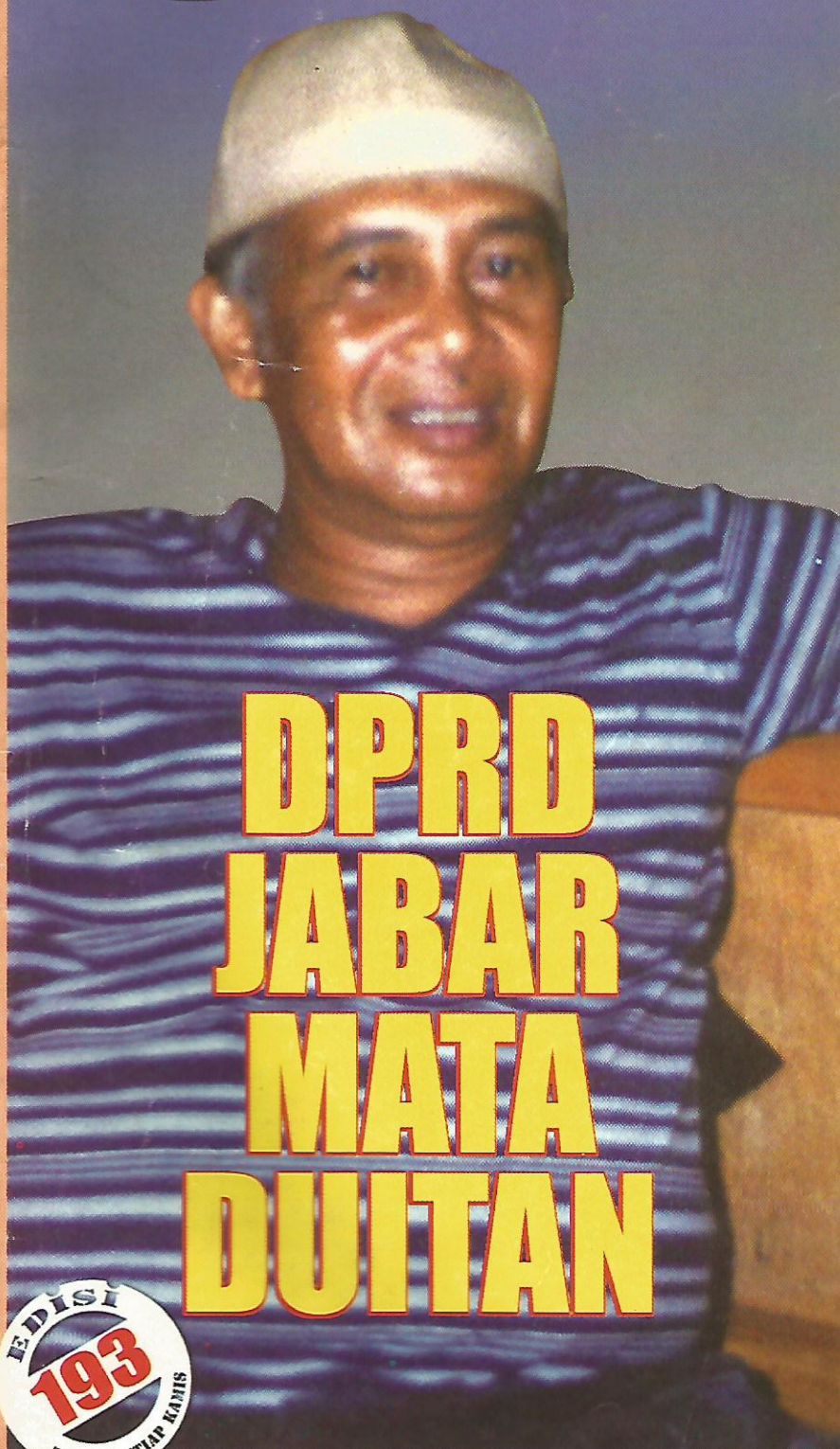


GARDA



**DPRD
JABAR
MATA
DUITAN**



**RAKYAT
MENUNGGU
TETESAN REJEKI**

**R&D 'MAIN MATA'
PENGUASA-
KONGLOMERAT**



**JADI SASARAN
TEMBAK**



28 Desember
1998

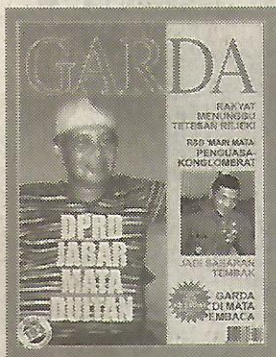
**HUT
KE EMPAT**

28 Desember
2002

**GARDA
DI MATA
PEMBACA**



Agama	hal	45
Ekonomi	hal	50
Gardatorial	hal	5
Hankam	hal	54
Hukum	hal	34
Intermezo	hal	78
Iptek	hal	75
Jendela	hal	3
Kesehatan	hal	49
Kriminal	hal	64
Laporan Terdepan	hal	6
Laporan Khas	hal	46
Lingkungan	hal	77
Mancanegara	hal	80



Cover:
Siapa bilang anggota Dewan semata-mata memperjuangkan kepentingan rakyat? Yang banyak basa-basi politik. Bukti, ada di lingkungan DPRD Jawa Barat. Mereka lebih banyak memikirkan kepentingan diri sendiri.

Compugrafi :
Bambang WR.



SEDERHANA: Hari Ulang Tahun Kodam Jaya ke-53 diperingati sangat sederhana. Tidak ada hidangan mewah, makanan disajikan dengan piring khas prajurit.

Media	hal	32	Santai	hal	69
Olahraga	hal	37	Surat dan Komentar	hal	8
Penjuru Negeri	hal	58	Sosial	hal	36
Politik	hal	28	Tokoh	hal	12
Pendidikan	hal	57	Tilikan: Faisal Baasir	hal	67
Pusat Perhatian	hal	14	Tilikan: Yulianto Syahyu	hal	26

KARIKATUR

DAMPAK DARI
RELEASE AND DISCHARGE,
PEMBEBASAN UTANG
KONGLOMERAT KELAS KAKAP,
SUDAH JELAS ... !



YAITU RAWAN DALAM
MEKANISME MAUPUN
PROSEDUR PEMBERIANNYA
DAN RENTAN BAGI BEBAN
PEREKONOMIAN RAKYAT



NAH, YANG BELUM JELAS ...
PEMBERIANNYA BERDASARKAN
KEPUTUSAN POLITIK
ATAU
KEPUTUSAN HUKUM ... ?!



RUDI

Hak Jaminan dalam UU Kepailitan

Yulianto Syahyu



**UU Kepailitan
mengaburkan
konsep dan
tujuan hak
jaminan dan
memperkosa hak
kreditur.**

Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggodok Rancangan Undang-undang Kepailitan yang baru. Ini suatu isyarat betapa Undang-undang Kepailitan yang berlaku sekarang menimbulkan beberapa masalah dalam penerapannya. Walaupun perubahan atas suatu undang-undang yang berlaku belum terlalu lama merupakan langkah yang tidak efisien, tapi ini sebuah pelajaran yang harus dipetik oleh pengambil kebijakan dan regulator di republik ini.

Penulis berharap, tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU Kepailitan yang sekarang telah diserahkan ke DPR. Mudah-mudahan pembahasan dan penetapannya menjadi UU tidak terlalu lama.

Berangkat dari pokok permasalahan yang akan ditilik sehubungan dengan pengaruh UU Kepailitan terhadap pemegang hak jaminan, maka dapat ditelaah sinkronisasi atau kontroversi antara pasal 56 dan pasal 56A UUK. Hal mana menarik untuk dikaji antara kedua pasal yang saling bertentangan tersebut, sehingga UU Kepailitan mengaburkan konsep dan tujuan hak jaminan dan memperkosa hak kreditur pemegang hak jaminan dalam mengeksekusi hak jaminan.

Menurut ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan, setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditur pemegang Hak Jaminan (Hipotik, Hak Tanggungan, Hak Gadai, Fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Ketentuan Pasal 56 adalah sejalan dengan ketentuan mengenai, dan dengan demikian mengakui, hak separatis dari pemegang Hak Jaminan sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Percantuman ketentuan Pasal 56 ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditur.

Pasal 56A ayat (1) menentukan bahwa Hak Eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ketentuan Pasal 56A ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (agunan) yang diakui oleh Pasal 56 ayat (1) itu.

Penjelasan dari Pasal 56A mengemukakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1) itu bertujuan, antara lain :

- Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau
- Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Menurut hemat penulis asas yang dianut oleh suatu Undang-undang Kepailitan ialah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya perdamaian seyogianya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan.

Penjelasan pasal itu yang menentukan bahwa penangguhan dimaksud bertujuan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, adalah bertentangan dengan hak separatis dari pemegang Hak Jaminan (Hak Agunan). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi hak separatis dari seorang kreditur pemegang Hak Jaminan ialah bahwa benda-benda yang dibebani dengan Hak Jaminan (Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit.

Penjelasan Pasal 56A ayat (3) mengemukakan bahwa barang yang dibebani dengan Hak Agunan merupakan harta pailit. Dari penjelasan Pasal 56A ayat (3) tersebut, nampak Undang-undang ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan Pasal 56 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dari kreditur preferen, tetapi di pihak lain ketentuan Pasal 56A ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan Hak Agunan merupakan harta pailit.

Apa makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 56A ayat (3) itu? Artinya ialah bahwa UU Kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani Hak Jaminan sebagai benda-benda yang bukan merupakan harta pailit. Sikap UU Kepailitan yang demikian itu merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi sistem hukum Hak Jaminan di dalam hukum Perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan Hak Jaminan itu.

Pasal 56A ayat (3) menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan Pasal 57 menentukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1) (yaitu Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Fidusia, Hipotik kapal laut dan kapal terbang, penulis) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1). Menurut ketentuan Pasal 57 ayat (2), setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (yaitu telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, penulis) kurator harus menuntut diteruskannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

Sehubungan dengan sikap UU Kepailitan yang memasukkan benda-benda yang dibebani Hak Jaminan sebagai bagian dari harta pailit sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka ketentuan Pasal 56A berlaku juga bagi penjualan benda-benda yang dibebani Hak Jaminan. Penjelasan Pasal 56A ayat (3) mendukung sikap yang demikian itu. Sebagaimana diketahui, Pasal 56A ayat (3) mengemukakan bahwa harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator, terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan Hak Agunan atas kebendaan.

Tidak jelas

Ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56A ayat (3) dan Pasal 57, menegaskan dan memperjelas sikap UU Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari kreditur pemegang Hak Jaminan, karena memasukkan benda-benda yang dibebani Hak Jaminan sebagai harta pailit, sekaligus telah tidak mengakui dan merenggut hak kreditur pemegang Hak Jaminan untuk dapat mengeksekusi Hak Jaminannya, yaitu dengan cara menjual benda-benda yang merupakan agunan kredit/pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan membebaskan Hak Jaminan di atas benda-benda agunan itu.

Ketidakjelasan lain yang timbul sehubungan dengan ketentuan Pasal 56A ayat (3) itu ialah, bagaimana uang hasil penjualan barang-barang itu akan dibagikan kepada para kreditur. Apakah hasilnya akan dibagikan kepada para kreditur. Apakah hasilnya akan diserahkan seluruhnya oleh kurator kepada kreditur preferen yang menjadi pemegang Hak Jaminan Fidusia itu, ataukah akan dibagikan kepada semua kreditur dengan mengabaikan berlakunya Hak Jaminan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan Pasal 57 menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) (yaitu Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Fidusia, Hipotik kapal laut dan kapal terbang, penulis) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling

lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) (yaitu telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, penulis) kurator harus menuntut diteruskannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

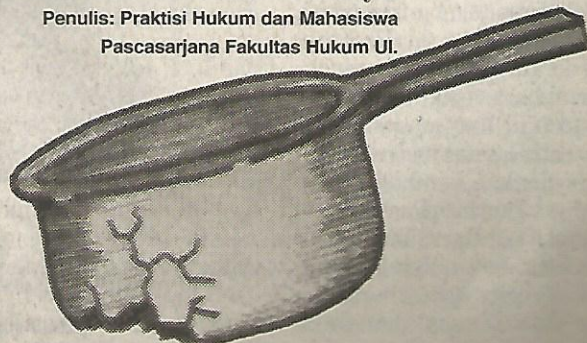
Disamping ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan (hak agunan), ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) itu tidak realistis. Di dalam praktik sangat sulit bagi seorang kreditur untuk dapat melakukan eksekusi hak-hak jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Banyak faktor di luar kendali kreditur pemegang Hak Jaminan yang membuat berlarut-larutnya eksekusi Hak Jaminan itu.

Selanjutnya pengaruh UU Kepailitan terhadap hak jaminan khususnya pemegang hak tanggungan adalah dalam hal dukungan pelayanan pertanahan yang diperlukan, kiranya perlu dipertanyakan sejauh mana kewenangan BPN, PPAT dan pengadilan dalam memberikan pelayanan dan jaminan terhadap pemberi dan pemegang hak jaminan dalam proses kepailitan.

Sampai saat ini belum diatur oleh undang-undang tentang pola kerja terpadu antara institusi yang mengelola administrasi pertanahan seperti BPN dan PPAT dengan lembaga peradilan dalam mengamankan aset yang dijadikan jaminan untuk mendukung pelayanan pertanahan yang diperlukan, sehingga akan lebih efektif jika Undang-undang kepailitan baru yang akan datang dapat mendesain format baru dalam memberikan pengamanan dan dukungan pelayanan pertanahan kepada pemegang hak jaminan dalam proses kepailitan.

Tidak cukup hanya PPAT atau BPN mengadakan kerjasama secara insidentil dengan Pengadilan Niaga untuk mengetahui perkara-perkara kepailitan dan PKPU yang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tanpa ada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan perbuatan hukum apa yang harus dilakukan oleh para penyelenggara administrasi tanah tersebut. Sehingga dengan dilandasi peraturan perundang-undangan yang memadai pihak lembaga peradilan melayani tidak berdasarkan suka atau tidak suka atau bahkan sesukanya.

Penulis: Praktisi Hukum dan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UI.



**Sampai saat ini
belum diatur
undang-undang
tentang pola
kerja terpadu
antara institusi
yang mengelola
administrasi
pertanahan.**